



Reklamasi di Danau Singkarak tak Kantongi Izin

Afrizal - SUMBAR.GOBLOG.CO.ID

Jan 25, 2022 - 23:57



Solok – Sekdaprov Sumatera Barat Hansastri memastikan kegiatan reklamasi yang dilakukan di dermaga Jorong Kalukua Nagari Singkarak Kabupaten Solok tidak mengantongi izin dari Pemprov sehingga dapat dikatakan ilegal.

“Kami perintahkan penghentian kegiatan langsung saat ini,” kata dia, Selasa (25/1).

Ia mengatakan kegiatan reklamasi itu sudah ada sejak 2016 dan Pemprov Sumbar sudah melakukan tindak lanjut dari temuan di lapangan saat itu.

“Kini mereka bekerja lagi dan kita minta berhenti,” kata dia.

Plt Juru Bicara KPK RI bidang pencegahan Ipi Maryati Kuding mengatakan saat ini tim KPK sudah berada di Sumbar menindaklanjuti diskusi daring yang dilakukan KPK bersama Pemrov Sumbar serta Walhi Sumbar terkait kajian penyelamatan kekayaan negara di Danau Singkarak.

“Tim Koordinasi Supervisi Pencegahan KPK saat ini sudah berada di Sumbar,” kata dia

Sebelumnya Walhi Sumatera Barat meminta KPK untuk mengusut pembangunan ilegal di tepian Danau Singkarak yang diduga berpotensi membuat kerugian bagi negara.

“Kita meminta KPK mengusut dan melakukan kajian mendetail terkait potensi kerugian Negara dari pemanfaatan aktivitas pembangunan ilegal di Danau Singkarak,” kata Kadep Kajian Advokasi dan Kampanye Walhi Sumbar Tommy Adam dalam diskusi bersama KPK.

Ia mengatakan penimbunan danau di dermaga Jorong Kalukua Nagari Singkarak Kabupaten Solok telah dilakukan sejak Juli 2016 oleh PT. Kaluku Indah Permai dengan luas danau yang ditimbun sekitar 30 hingga 50 meter dan panjang 70-100 meter.

Menurutnya pembangunan itu tidak sesuai dengan Perda Kabupaten Solok 1 Tahun 2013 tentang RTRW Kabupaten Solok Tahun 2022 – 2031.

Sementara itu Bupati Solok Epyardi Asda membantah adanya dugaan tentang reklamasi ilegal di wilayah badan air Danau Singkarak, Sumatera Barat tanpa dasar hukum dan izin pemanfaatan yang jelas.

“Saya membantah adanya tuduhan tentang melakukan reklamasi ilegal di wilayah badan air dermaga Jorong Kalukua Nagari Singkarak. Saya juga bingung kenapa isu tersebut telah sampai ke KPK,” kata dia.

Ia mengatakan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Solok menjalin kerja sama dengan pihak ketiga bertujuan untuk mengembangkan dan membangkitkan potensi pariwisata yang ada di Kabupaten Solok, khususnya di Danau Singkarak.

Ia juga mengatakan Pemkab Solok bersama investor hanya ingin membangun dan membangkitkan kembali perekonomian masyarakat melalui pengembangan potensi pariwisata daerah setempat.

“Tetapi malah beredar isu yang menyatakan bahwa kami melakukan reklamasi Danau Singkarak,” katanya. (**)